

EVALUASI PROGRAM JAKPRENEUR (JAKARTA ENTREPRENEUR) DI JAKARTA SELATAN

Hasna Putri Naura, Ari Subowo

Program Studi S1 Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in promoting local economic development in the Province of DKI Jakarta; however, they continue to face various challenges in business development. To address these issues, the Provincial Government of DKI Jakarta launched the Jakpreneur Program as stipulated in Governor Regulation of DKI Jakarta Number of 020, which provides seven supporting facilities for entrepreneurs. In practice, the program still encounters several issues, including low continued participation, a decline in the number of participants, and the limited performance of program facilitators. This study aims to evaluate the implementation of the Jakpreneur Program in South Jakarta, focusing on the districts of Kebayoran Lama, Pancoran, and Tebet. A descriptive qualitative approach was employed using interviews, observations, and documentation, with data analysis based on William N. Dunn's program evaluation criteria. The findings indicate that while the Jakpreneur Program has contributed to improving MSMEs' business capacity, its implementation has not been evenly distributed across districts. Kebayoran Lama demonstrates good practice in engaging young entrepreneurs, Pancoran experiences low sustainability of participant involvement, and Tebet faces coordination challenges among local government agencies despite being responsive in facilitating access to financing. Therefore, strengthening evaluation mechanisms and inter-agency coordination is necessary to ensure the program becomes more targeted and sustainable.

Keywords: Local Economic Development, Jakpreneur, Program Evaluation, MSMEs, MSME Development

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal di Provinsi DKI Jakarta, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Program Jakpreneur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor Tahun 020 dengan menyediakan tujuh fasilitas bagi pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi permasalahan seperti rendahnya partisipasi lanjutan peserta, penurunan jumlah partisipan, serta pendamping yang tidak menjalankan peran. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Jakpreneur di Jakarta Selatan dengan studi kasus Kecamatan Kebayoran Lama, Pancoran, dan Tebet. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kriteria evaluasi William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jakpreneur telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha UMKM, namun pelaksanaannya belum merata. Kebayoran Lama menunjukkan praktik baik dalam menjangkau generasi muda, Pancoran menghadapi rendahnya keberlanjutan partisipasi, dan Tebet mengalami kendala koordinasi antar perangkat daerah meskipun responsif dalam akses permodalan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi dan koordinasi lintas instansi agar program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata kunci : Pembangunan Ekonomi Lokal, Jakpreneur, Evaluasi Program, UMKM, Perkembangan UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Jakpreneur sebagai kebijakan pembangunan ekonomi lokal berupaya mendorong peningkatan kapasitas, kemandirian, dan daya saing UMKM melalui pelatihan, pendampingan, digitalisasi, serta fasilitasi akses pasar dan permodalan. Berbagai inisiatif telah dijalankan, mulai dari penerapan pendekatan 7 Langkah Pasti Akan Sukses (PAS), pelatihan e-Smart, integrasi dengan platform e-commerce, penggunaan QRIS, hingga pelibatan UMKM dalam bazar nasional dan internasional. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang adaptif dan kompetitif, bahkan hingga mendorong UMKM menembus pasar global.

Namun demikian, di balik berbagai keberhasilan tersebut, pelaksanaan Program Jakpreneur masih menghadapi sejumlah tantangan. Data menunjukkan adanya penurunan partisipasi peserta pada setiap tahapan program, mulai dari pendaftaran hingga pendampingan, serta penurunan jumlah partisipan yang signifikan pada tahun 2024.

Tabel 1. Partisipan Jakpreneur 2023-2024

No.	Program	Jumlah Partisipan	
		2023	2024
1.	Pendaftaran (P1)	29.707	19.338
2.	Pelatihan (P2)	48.515	41.617
3.	Pendampingan (P3)	20.585	7.062
4.	Perizinan (P4)	247.702	11.616
5.	Pemasaran (P5)	20.911	13.593
6.	Pelaporan Keuangan (P6)	3.351	1.032
7.	Permodalan (P7)	1.514	126

Sumber : Data Mingguan Dinas PPKUKM DKI Jakarta

Selain itu, masih ditemukan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurang optimalnya peran pendamping, serta kendala administratif dan teknis yang menyulitkan sebagian pelaku usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan manfaat bagi seluruh peserta.

Sejumlah penelitian sebelumnya memperkuat temuan tersebut. Kholishoh (2024) menyoroti lemahnya peran pendamping dan fokus program yang cenderung pada kuantitas peserta dibandingkan kualitas pelaku usaha.

Panjaitan (2023) menemukan adanya permasalahan dalam koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Jakpreneur. Sementara itu, Di sisi lain, respons positif peserta di media sosial menunjukkan bahwa program ini tetap memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha yang aktif dan konsisten mengikuti rangkaian kegiatan.

Berdasarkan dinamika tersebut, evaluasi Program Jakpreneur menjadi penting untuk memahami sejauh mana program ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti aspek perencanaan, implementasi, atau teknologi secara parsial, penelitian ini menempatkan fokus pada evaluasi keberjalanan Program Jakpreneur di Jakarta Selatan dengan menelaah secara komprehensif faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebaruan dalam memahami efektivitas implementasi kebijakan pembangunan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan UMKM, sekaligus menjadi dasar perbaikan program agar lebih berkelanjutan dan berdampak nyata.

KAJIAN TEORI

a. Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2019:3) administrasi publik adalah

tindakan mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya dan personel publik dalam rangka mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi keputusan kebijakan publik. Kedua tokoh tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik adalah ilmu dan seni yang bertujuan untuk mengelola urusan publik dan menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan. Selain itu, disiplin ilmu administrasi publik berupaya untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat melalui berbagai peningkatan atau modifikasi, khususnya dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, dan organisasi.

b. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik dipandang sebagai tahap akhir dalam analisis kebijakan untuk menilai apakah program atau kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan telah mencapai hasil yang diharapkan. William Dunn dalam Suratman (2017:160-161) menyatakan bahwa evaluasi mencakup penaksiran, pemberian nilai, dan penilaian atas manfaat atau nilai hasil kebijakan. Evaluasi menjadi proses penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Parsons, yang dikutip oleh Anggara (2014:274) menekankan bahwa evaluasi kebijakan mencakup aktivitas menaksir,

mengaudit, menilai, dan mengontrol kebijakan publik.

c. Evaluasi Program

Evaluasi kebijakan seringkali disamakan dengan evaluasi program. Meskipun saling berkaitan, keduanya adalah hal yang berbeda. Evaluasi Kebijakan menilai keseluruhan proses dan dampak kebijakan secara makro, sedangkan evaluasi program fokus pada pelaksanaan teknis dari program sebagai bagian dari kebijakan. Evaluasi program adalah serangkaian aktivitas yang sengaja dilakukan untuk menilai seberapa berhasil suatu program yang telah direncanakan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut (Bahri et al., 020)

d. Kriteria Evaluasi

Untuk menganalisis program Jakpreneur, penelitian ini akan menggunakan teori evaluasi William N. Dunn, yang menekankan pada evaluasi berbasis kriteria. Dunn dalam Nugroho (2012) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut:

1. Efektifitas; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?

2. Efisiensi ; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. Perataan ; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok kelompok tertentu?
6. Ketepatan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian eksplanatif. Lokasi penelitian berfokus pada kawasan pelaksanaan Jakpreneur di Jakarta Selatan khususnya di tiga kecamatan yakni Kecamatan Kebayoran Lama, Pancoran, dan Tebet serta Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan sebagai bagian dari konteks penelitian. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria khusus seperti, pelaku UMKM peserta Jakpreneur yang merasakan langsung dampak

program, penyelenggara program pada tingkat suku dinas dan kecamatan, serta pendamping lapangan yang menjadi perantara antara program dan peserta. Sumber data dibagi menjadi primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi terhadap kegiatan pelatihan dan bazar, serta dokumentasi berupa arsip, foto kegiatan, dan dokumen tertulis untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Jakpreneur di Jakarta Selatan

Evaluasi Program Jakpreneur di Jakarta Selatan dinilai berdasarkan indikator evaluasi menurut William N. Dunn. Mencakup, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan.

a. Efektivitas

Efektifitas menjadi indikator capaian yang penulis gunakan dalam melihat sejauh mana program Jakpreneur mampu mencapai tujuan utamanya. Dalam hal ini penulis menilai dari, Sosialisasi dan pemahaman program, Perkembangan kapasitas UMKM berkat program

Jakpreneur, Relevansi dan kualitas pelatihan, Fasilitasi pemasaran dan akses pasar, serta kemandirian dan keberlanjutan usaha. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa program Jakpreneur belum mampu menjawab tujuannya dalam aspek pemahaman tujuan program melalui sosialisasi, outcome pelaksanaan bazar yang masih fluktuatif dalam memperluas pasar dan tingkat kemandirian peserta dan keberlanjutan usaha.

Sosialisasi program telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Suku Dinas PPKUKM, kecamatan, dan pendamping lapangan melalui berbagai media dan kegiatan. Namun, pemahaman pelaku UMKM terhadap tujuan dan manfaat program belum sepenuhnya optimal, karena sebagian peserta baru memahami substansi program setelah terlibat langsung dalam kegiatan Jakpreneur, sehingga efektivitas sosialisasi masih menghadapi tantangan pada kualitas penyampaian informasi.

Dari aspek perkembangan kapasitas UMKM, Program Jakpreneur memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, omzet, serta perluasan jejaring dan akses pasar. Pelatihan soft skill dan hard skill yang diselenggarakan dinilai relevan dengan kebutuhan peserta, terutama pelatihan hard skill yang bersifat aplikatif dan disertai

dukungan alat produksi. Meskipun materi pelatihan telah disusun berdasarkan silabus dan melibatkan narasumber kompeten, tingkat partisipasi dan antusiasme peserta menunjukkan perbedaan di setiap wilayah, yang mencerminkan variasi kebutuhan dan kapasitas UMKM.

Pada aspek fasilitasi pemasaran, kegiatan bazar berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional dan internasional berfungsi sebagai sarana promosi dan pembelajaran pasar, meskipun dampaknya terhadap peningkatan omzet belum konsisten dan dipengaruhi oleh lokasi serta waktu pelaksanaan. Sementara itu, kemandirian dan keberlanjutan usaha UMKM masih berkembang secara bertahap, dengan sebagian besar peserta masih bergantung pada program dan hanya sebagian kecil yang mampu mengelola usaha secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Program Jakpreneur telah memberikan kontribusi positif, efektivitasnya dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha UMKM belum sepenuhnya optimal.

b. Efisiensi

Efisiensi dimaknai sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Pada penelitian ini penulis akan menilai berdasarkan perbandingan

anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi, kendala birokrasi maupun administrasi yang berdampak pada inefisiensi dan frekuensi penjadwalan program.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan anggaran Program Jakpreneur di Jakarta Selatan menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta direalisasikan sebesar 92,53% dan digunakan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Mekanisme penganggaran yang bersifat terkunci serta perencanaan berbasis triwulan membantu memastikan penggunaan anggaran tetap terarah dan meminimalkan pemborosan.

Tabel 2 . Realisasi APBD Jakpreneur

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5. BELANJA				
5.1 BELANJA OPERASI				
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	27.726.254.757	25.644.425.960	92,49	
JUMLAH BELANJA OPERASI	27.726.254.757	25.644.425.960	92,49	
5.2 BELANJA MODAL				
5.2 BELANJA MODAL	393.548.593	374.585.000	95,18	
JUMLAH BELANJA MODAL	393.548.593	374.585.000	95,18	
JUMLAH BELANJA	28.119.803.350	26.019.010.960	92,53	

Sumber : bpkd-jakarta.go.id

Dari sisi birokrasi dan administrasi, pelaksanaan program dinilai cukup efisien karena telah didukung oleh sistem digital yang mempermudah proses pendataan dan pemberkasan. Namun demikian, masih ditemukan kendala pada sistem e-order yang memerlukan waktu dalam proses klaim invoice serta keterbatasan sarana pendukung di beberapa wilayah, yang

berdampak pada efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi juga tercermin dalam penjadwalan pelatihan dan kegiatan bazar yang disusun secara terencana dan bergilir antar kecamatan. Penyesuaian waktu pelaksanaan dengan momentum kegiatan masyarakat dinilai mampu meningkatkan efektivitas kegiatan. Meskipun demikian, pelaksanaan pelatihan hard skill secara berturut-turut berpotensi menimbulkan beban kerja yang cukup tinggi bagi pelaksana program.

c. Kecukupan

Indikator kecukupan akan menilai apakah sumber daya dan hasil yang digunakan cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ditargetkan. Penulis akan menilai dari aspek kualifikasi pendamping dan kecukupan dukungan yang diberikan terhadap UMKM, apakah UMKM masih merasakan permasalahan pada usahanya setelah bergabung di Jakpreneur.

Indikator perbandingan antara jumlah pendamping dan peserta UMKM dikategorikan sudah terlaksana dengan baik. Meskipun jumlah pendamping yang ada masih terbatas, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan diterapkannya beban kerja yang lebih merata melalui pembagian penanggung jawab program (PIC). Begitupun pada

indikator kualifikasi dan beban kerja pendamping yang ditunjukkan dengan adanya kualifikasi berupa sertifikasi Pendamping Kewirausahaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selanjutnya, terkait overload atau beban kerja berlebih bagi pendamping seringkali terjadi pada momen tertentu. Namun, hal tersebut masih dapat diantisipasi oleh masing-masing kecamatan dan tidak berdampak langsung pada kualitas pendampingan yang diberikan. Indikator berikutnya yakni pemenuhan kebutuhan bagi peserta binaan menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini disebabkan adanya penekanan pada pemerataan fasilitas dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan peserta secara mendalam.

d. Perataan

Perataan Program Jakpreneur dianalisis untuk menilai keadilan jangkauan dan distribusi manfaat program terhadap peserta binaan berdasarkan kelompok usaha dan kelompok usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perataan program Jakpreneur sudah berjalan dengan baik dan merata dalam menjangkau kelompok usaha. Namun, masih menunjukkan kelemahan pada pemerataan secara demografis dan keterlibatan anak muda.

Jangkauan kelompok usaha Program Jakpreneur mencakup tiga kategori utama,

yaitu UMKM yang masih berada pada tahap ide usaha, UMKM yang telah memiliki produk namun belum mampu mengembangkan usaha, serta UMKM yang siap naik kelas tetapi masih membutuhkan pendampingan. Di Kecamatan Tebet, jangkauan peserta belum optimal akibat kendala administratif seperti kesesuaian domisili, namun distribusi manfaat bagi peserta yang tergabung dinilai merata.

Dari sisi kelompok usia, mayoritas peserta Program Jakpreneur berasal dari kelompok usia 35–55 tahun, khususnya ibu rumah tangga, sedangkan partisipasi generasi muda masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi anak muda dipengaruhi oleh persepsi terhadap usaha mikro yang dianggap tidak memberikan hasil cepat. Sebaliknya, ibu rumah tangga memiliki motivasi tinggi, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan kemampuan digital, waktu, serta biaya.

e. Responsivitas

Responsivitas Program Jakpreneur dianalisis untuk menilai kemampuan program dalam menampung, merespons, dan menindaklanjuti kebutuhan serta keluhan peserta binaan. Penilaian dilakukan melalui mekanisme umpan balik, jenis keluhan yang disampaikan, serta respons pelaksana program dalam hal ini Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah serta kasatpel dan pendamping kecamatan terhadap kebutuhan pelaku UMKM.

Mekanisme penyampaian umpan balik dilakukan secara fleksibel melalui pendamping, Kasatpel kecamatan, WhatsApp, kunjungan langsung ke kantor kecamatan, serta hotline Halo Jakpreneur. Jenis keluhan yang paling sering disampaikan menunjukkan perbedaan di setiap kecamatan. Kecamatan Kebayoran Lama seringkali mendapat masukan terkait keterbatasan fasilitas bazar, antusias peminat yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pelaksanaan yang mampu difasilitasi oleh Jakpreneur. Sedangkan, pada Kecamatan Pancoran eringkali terdapat masukan dan keluhan terkait pelaksanaan bazar yang tidak ramai pengunjung. Pendamping nantinya akan mempertimbangkan keluhan tersebut dan juga dijadikan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya.

Tindak lanjut atas keluhan peserta dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan dari tingkat kecamatan hingga kota. Permasalahan teknis umumnya dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, sedangkan keluhan yang membutuhkan kebijakan atau anggaran diteruskan ke Suku Dinas melalui forum Monitoring dan Evaluasi. Respons sementara diberikan

melalui penjelasan, sistem *waiting list*, serta penyesuaian teknis di lapangan sebagai bentuk respons adaptif.

Secara keseluruhan, tingkat responsivitas program Jakpreneur dikatakan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan bagaimana Jakpreneur berusaha untuk terbuka dengan peserta binaan dan bagaimana Jakpreneur mampu menampung, menyalurkan, dan memberi solusi kepada peserta binaan. Namun, pembatasan fasilitas membuat Jakpreneur belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan preferensi peserta binaan.

f. Ketepatan

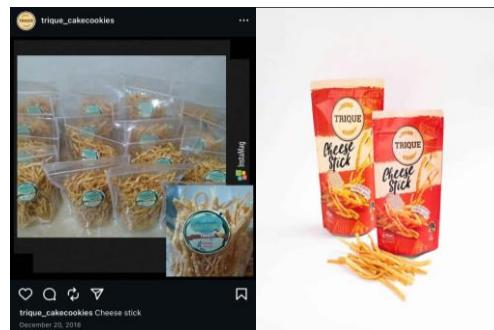
Ketepatan digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan program dapat tepat sasaran, khususnya dalam mendorong kemandirian UMKM naik kelas. Indikator ini dinilai dengan melihat ketepat sasaran Jakpreneur dalam mendorong kemandirian UMKM dan kesesuaian tujuan awal dengan pelaksanaan di lapangan.

Ketepatan dalam evaluasi program Jakpreneur digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan program tepat sasaran dan layak sebagai tujuan kebijakan, khususnya dalam mendorong kemandirian dan UMKM naik kelas. Penilaian dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan awal program dengan dampak nyata di

lapangan serta realitas implementasi program di tingkat kecamatan.

Berdasarkan temuan lapangan, program Jakpreneur dinilai tepat sasaran dalam membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha. Peserta binaan merasakan manfaat berupa peningkatan omzet dalam kurun 3–6 bulan, kemudahan akses pemasaran, pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan kemampuan pengelolaan usaha. Namun demikian, keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi dan ketahanan internal pelaku UMKM, karena program berperan sebagai fasilitator dan pendorong eksternal.

Gambar 1. Perkembangan UMKM



Sumber:Instagram.com/trique_cakecookies

Observasi terhadap UMKM binaan menunjukkan adanya perkembangan usaha yang signifikan, seperti perolehan sertifikasi halal, pembaruan kemasan, partisipasi dalam bazar skala daerah dan nasional, hingga kepemilikan tempat usaha tetap. Hal ini menunjukkan bahwa program

Jakpreneur mampu memfasilitasi UMKM menuju naik kelas, meskipun kecepatan dan tingkat keberhasilannya berbeda pada setiap peserta.

Namun, masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan awal dan pelaksanaan di lapangan, terutama terkait konsistensi partisipasi dan komitmen peserta. Tidak seluruh peserta mampu memanfaatkan fasilitas secara optimal akibat faktor individu dan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, indikator ketepatan dapat dikatakan sudah tercapai dengan baik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan partisipasi dan keberlanjutan peserta binaan.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Program Jakpreneur di Jakarta Selatan

Penelitian ini menemukan sejumlah faktor-faktor pendukung dan penghambat program Jakpreneur di Jakarta Selatan yang dipengaruhi oleh tingkat motivasi dan ketahanan usaha, keterbatasan anggaran dan pemerataan fasilitas, serta kondisi pasar yang tidak menentu.

a. Tingkat Motivasi dan Keberlanjutan Peserta

Tingkat motivasi dan keberlanjutan bergantung pada kondisi internal peserta binaan terkait kesiapan peserta untuk

mengikuti rangkaian program dan menikmati seluruh proses perkembangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan keberlanjutan UMKM terhadap program Jakpreneur bersifat beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengalaman langsung, kebutuhan usaha, kapasitas masing-masing pelaku, dan ekspektasi terhadap hasil yang ingin dicapai.

Tabel 3. Tingkat Keaktifan Peserta

No.	Program	2025		
		Kebayoran Lama	Pancoran	Tebet
1	Pendaftaran	330	264	244
2	Pelatihan	800	800	800
3	Pendampingan	4	14	5
4	Perizinan	211	149	150
5	Pemasaran	249	244	292
6	Pelaporan Keuangan	0	0	0
7	Pemodalan	0	0	0

Sumber : Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan

Berdasarkan tabel menunjukkan tingkat keaktifan peserta Jakpreneur bervariasi di tiga kecamatan. Tingkat keberlanjutan juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan kebutuhan bagi masing-masing peserta binaan sehingga mereka memilih program Jakpreneur dengan menyesuaikan pada kebutuhan masing-masing tanpa mengikuti keseluruhan rangkaian program secara berurutan.

Bagi para peserta yang memutuskan untuk berhenti bergabung dalam program Jakpreneur biasanya terjadi karena faktor waktu, beban kerja, dan kepentingan pribadi. Pelatihan dianggap terlalu menyita

waktu mengingat pelaksanaannya dilaksanakan selama lebih dari satu hari, hal ini cukup sulit diterima bagi UMKM yang belum memiliki karyawan dan harus mempertimbangkan kegiatan operasional di kedai.

b. Keterbatasan Anggaran dan Pemerataan Fasilitas

Keterbatasan anggaran yang dimiliki program Jakpreneur turut memengaruhi strategi pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam upaya pemerataan fasilitas bagi peserta binaan. Kondisi ini menyebabkan setiap peserta hanya dapat mengikuti satu program pembinaan utama dalam satu tahun anggaran. Misalnya, satu peserta hanya dapat mengikuti satu kali pelatihan hard skill, satu kali pelaksanaan bazar, atau satu kali bantuan perizinan. sehingga pemenuhan kebutuhan pengembangan usaha belum dapat dilakukan secara mendalam. Pendekatan pemerataan ini memang memperluas jangkauan manfaat program, namun membatasi intensitas pendampingan yang dibutuhkan sebagian UMKM untuk berkembang secara optimal. Sehingga meskipun bantuan program tidak dipungut biaya sedikitpun, masih terdapat aspek lain yang perlu dikorbankan, misalnya waktu. Hal ini dikarenakan UMKM hanya bisa memilih satu fasilitas besar dalam setiap satu tahun anggaran.

c. Kondisi Pasar

Kondisi pasar yang fluktuatif dan tidak stabil berdampak pada menurunnya ketahanan usaha pelaku UMKM. Jumlah pelaku usaha yang terus bertambah tidak selalu diiringi dengan peningkatan jumlah pembeli secara cepat. Di sisi lain, keberhasilan usaha lebih banyak didukung oleh pemanfaatan platform penjualan online. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh program pembinaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar dan strategi usaha yang diterapkan secara mandiri.

Upaya perluasan pasar melalui kegiatan bazar belum sepenuhnya memberikan hasil optimal. Tidak seluruh pelaksanaan bazar ramai pengunjung dan sebagian UMKM mengakui bahwa pasar yang terbentuk masih terbatas. Dari perspektif pelaksana program, tingkat keberhasilan bazar sangat bergantung pada mitra kerja sama, waktu pelaksanaan, intensitas promosi, serta lokasi kegiatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi Program Jakpreneur di Jakarta Selatan, program ini berhasil meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan UMKM, memperluas relasi pelaku usaha, menyajikan materi pelatihan yang relevan,

menunjukkan mekanisme umpan balik yang responsif; serta tepat sasaran dalam mendorong kemandirian sebagian peserta. Namun, pencapaian tujuan belum optimal pada aspek kemandirian dan keberlanjutan usaha: penurunan partisipan pada beberapa program terkait perbedaan kebutuhan pelaku usaha, dan keberlanjutan dipengaruhi faktor eksternal seperti keterbatasan waktu. Peran pendamping sudah maksimal dalam sosialisasi, koordinasi program, serta pemberian dukungan dan ide kreatif, tetapi masih terbatas dalam upaya memantau dan mengevaluasi kondisi usaha peserta secara menyeluruh. Faktor pendukung keberhasilan meliputi observasi kebutuhan UMKM sebagai dasar materi pelatihan, hubungan kuat antara pendamping dan peserta, dukungan infrastruktur, teknologi, SDM memadai, serta motivasi tinggi peserta. Sebaliknya, faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran yang menuntut pemerataan fasilitas sehingga kedalaman intervensi menjadi terbatas, serta kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi dan perbedaan kebutuhan, motivasi, dan ketahanan usaha peserta. Secara umum, Jakpreneur relatif berhasil pada aspek output program yang terlaksana sesuai rencana. Namun, belum konsisten pada aspek outcome, terlihat dari kemandirian dan kenaikan kelas pelaku usaha yang belum merata.

SARAN

1. Melakukan pemetaan peserta berbasis karakteristik dan kebutuhan usaha agar peserta yang dijaring memiliki kesiapan dan relevansi dengan jenis pelatihan, sehingga dapat meminimalisir penurunan partisipasi.
2. Memperbaiki strategi pemasaran dan pelaksanaan bazar dengan peningkatan promosi serta perluasan kerja sama antar stakeholder untuk meningkatkan kunjungan dan dampak pemasaran.
3. Menerapkan penjadwalan pendampingan yang lebih intensif bagi pendamping agar terfokus pada peserta yang membutuhkan intervensi berkelanjutan, sehingga perkembangan usaha peserta dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
4. Memperbaiki koordinasi birokrasi melalui sinkronisasi jadwal dan kebutuhan secara berkala serta penunjukan penanggung jawab (PIC) di masing-masing Satuan Kinerja Perangkat Daerah untuk mempercepat komunikasi dan tindak lanjut.
5. Meningkatkan keterlibatan generasi muda dengan pendekatan ke sekolah kejuruan (SMK) melalui workshop dan kegiatan bazar sekolah untuk menumbuhkan minat wirausaha sekaligus menyediakan jalur rekrutmen peserta muda.

DAFTAR PUSTAKA

Amanullah, N. I. (2022). *PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PROGRAM JAKPRENEUR DI KELURAHAN KEDOYA SELATAN, KECAMATAN KEBON JERUK, KOTA JAKARTA BARAT.* i–145.

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia.

Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala, R. (2020). *MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM PENJAMINAN MUTU WIDINA BHAKTI PERSADA* BANDUNG

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Profil industri mikro dan kecil Provinsi DKI Jakarta 2023.* Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta,

Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
Dinas PPKUKM Provinsi DKI

Jakarta. (2025, 10 Februari). Laporan mingguan.

Dwiyanto, A. (2008). *MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK.* Gadjah Mada University Press.

Kholisoh, H., Priyadi, B. P., & Purnaweni, H. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT*

Nugroho, R. D. (2012). *Public policy for the developing countries.* Pustaka Pelajar.

Suratman. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Capiya Publishing.